

Audit Sosial Dalam Pencegahan Korupsi PBJ pada Sektor Kontruksi di Indonesia

Natasya Dellia Krisnawati*, Satria Unggul Wicaksana Prakasa

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya,

Email : natasyadelliakrisnawati56@gmail.com

Submitted: 09-01-2025; Reviewed: 26-07-2025; Revised: 30-07-2025; Accepted: 31-07-2025

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.24525>

Abstract

Corruption in the procurement of goods and services (PBJ) in the Indonesian construction sector is the second largest corruption case after bribery in Indonesia. This corruption is carried out by involving the government and private contractors, thus damaging the quality of infrastructure and misusing public funds. Many studies have discussed corruption in PBJ, none have specifically highlighted the relationship between contractor compliance, the role of the community, and the effectiveness of social audits. This study uses a socio-legal method with a political economy of law approach to determine contractor compliance and the role of the community in preventing corruption in PBJ in the Indonesian construction sector, as well as the effectiveness of social audits in preventing corruption in the construction sector. The results show that contractor compliance with procurement regulations reduces the potential for corruption in construction projects. Community participation in public monitoring is important to detect violations. Social audits are effective in increasing transparency and accountability, but require government support and access to information. Collaboration between the community and the government is crucial to improving the accountability of construction projects and building public trust. This collaboration allows the community to be involved in the oversight process and ensure that projects are implemented in accordance with applicable regulations. With community involvement, potential violations can be detected early, so that preventive measures can be taken before the problem develops into corruption.

Keywords: Construction; Corruption; Social Audit

I. Pendahuluan

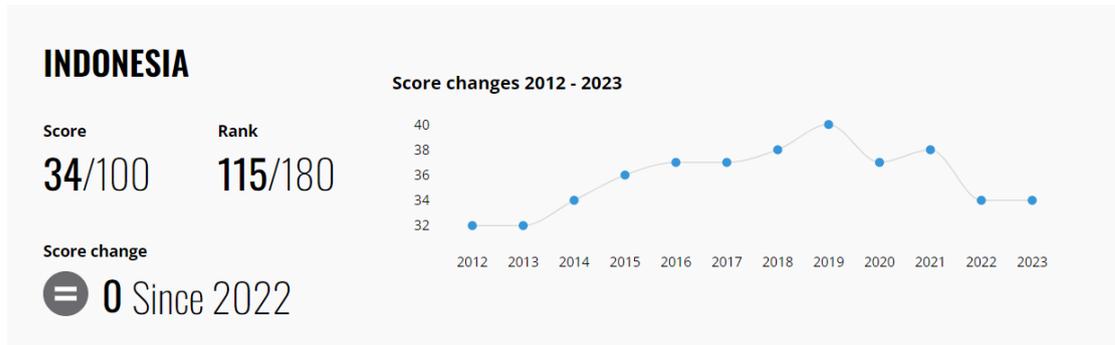
Korupsi merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensi, dengan banyak faktor yang saling terkait sehingga sulit untuk diberantas. Salah satu faktor utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif korupsi yang seringkali berujung pada toleransi terhadap praktik korupsi. Selain itu, rendahnya integritas di sektor publik dan swasta menciptakan budaya impunitas dalam melakukan praktik penyalahgunaan kekuasaan, dimana individu tidak merasa terikat oleh aturan dan moral.¹ Minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang jasa (PBJ) juga dapat memperburuk situasi, karena penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi tanpa pengawasan yang tepat.

Kurangnya akuntabilitas baik dari lembaga pemerintah maupun sektor swasta membuat sulitnya mengambil tindakan terhadap pelaku korupsi. Hal tersebut dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya melindungi kepentingan publik. Pemberantasan korupsi secara efektif memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pendidikan dan kesadaran masyarakat, peningkatan integritas individu dan organisasi, serta penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas.²

¹ Jeremy Mulholland, "The Weakening of Indonesia's Corruption Eradication Commission," *Eastasiaforum.Org*, last modified 2020, accessed October 18, 2024, <https://eastasiaforum.org/2020/01/28/the-weakening-of-indonesias-corruption-eradication-commission/>.

² Genta Tenri Mawangi, "Wamenkumham: Korupsi Sulit Diberantas Karena Lemahnya Integritas," *Https://Www.AntaraneWS.Com/*, last modified 2021, accessed October 19, 2024, <https://www.antaraneWS.com/berita/2434665/wamenkumham-korupsi-sulit-diberantas-karenalemahnya-integritas>.

Berdasarkan data yang dirilis oleh *Transparency International* pada tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-115 dari 180 negara dalam **Corruption Perceptions Index (CPI)**. Skor Indonesia sebesar 34/100, sama dengan skor pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap korupsi di sektor publik masih sangat tinggi dan tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.³



Gambar 1. Grafik Data Peringkat dan Skor Indonesia dalam Corruption Perceptions Index (CPI) dari tahun 2012-2023

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunggah data statistik tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara yang diperbarui pada tanggal 11 September 2024. Data tersebut mencakup berbagai jenis kasus korupsi, termasuk penyuapan, PBJ, penyalahgunaan anggaran, gratifikasi, perizinan, tindak pidana pencucian uang (TPPU), merintang proses KPK, dan pungutan liar. Berdasarkan data statistik yang terkumpul, tren korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa gratifikasi atau penyuapan mendominasi dengan total 1.035 kasus, yang menunjukkan tingginya tingkat ketidakjujuran dalam transaksi antara pihak berwenang dan sektor swasta. Disusul dengan 394 kasus korupsi PBJ yang tercatat, angka yang menunjukkan permasalahan serius dalam pengelolaan sumber daya publik. Situasi ini menyoroti perlunya langkah-langkah yang lebih efektif dan strategis untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip integritas dan transparansi di pemerintahan dan sektor swasta.⁴

JENIS PERKARA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
Pengadaan Barang/Jasa/KN	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	14	15	17	18	27	30	14	62	55	394
Perizinan			5	1	3	1				3	5	1	1	2	1			2		3		28
Gratifikasi/Penyuapan		7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	79	93	169	119	55	65	100	85	46	1035
Pungutan/Pemeriksaan			7	2	3			0		1	6	1	1		4	1			1	1	10	38
Penyalahgunaan Anggaran			5	3	10	8	5	4	3		4	2	1	1		2	6	3				57
TPPU									1	7	5	1	3	7	6	5	3	7	5	8	6	64
Merintang Proses KPK									2		3			2	3			1		2		13
JUMLAH	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	99	120	200	145	91	108	120	161	117	1629

Gambar 2. Data Statistik Korupsi Indonesia berdasarkan Jenis Perkara dari tahun 2004-2024

Korupsi dalam PBJ terjadi karena buruknya proses perencanaan dan penganggaran. Di sisi lain, kurangnya sumber data dan bahan referensi dalam penyusunan standarisasi harga-kualitas barang dan jasa. Menurut analisis Direktorat Penyidikan KPK terdapat enam tahapan dalam korupsi PBJ. Inti dari kecurangan dalam PBJ adalah manipulasi, kolusi, dan ketidak transparan yang terjadi di setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.⁵

Pada tahap perencanaan, penyimpangan sering terjadi dalam bentuk studi kelayakan proyek. Selain itu, batas maksimum biaya yang ditetapkan seringkali terlalu tinggi, yang membuka peluang bagi pemborosan anggaran dan manipulasi keuangan. Tidak jarang pula ditemukan rencana pengadaan yang fiktif, di mana barang atau jasa yang direncanakan tidak benar-benar diperlukan, namun tetap

³ CPI, "OUR WORK IN INDONESIA," <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>, last modified 2023, accessed October 17, 2024, <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>.

⁴ KPK, "STATISTIK DATA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN JENIS PERKARA," www.kpk.go.id, last modified 2024, accessed October 14, 2024, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>.

⁵ Pusat Edukasi Anti Korupsi, "Mencegah Korupsi Pada Pengadaan Barang & Jasa," <https://aclc.kpk.go.id/>, last modified 2024, accessed October 15, 2024, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240506-mencegah-korupsi-pada-pengadaan-barang-jasa>.

dianggarkan demi kepentingan tertentu. Pada tahap pengadaan, beberapa penyedia barang/jasa tidak menjalankan proyek dengan baik, ada kecenderungan untuk menghabiskan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tanpa memperhatikan kualitas dan hasil proyek. Penyimpangan ini semakin diperburuk dengan adanya praktik penunjukan langsung yang dilakukan tanpa proses lelang yang transparan dan pemilihan penyedia barang dan jasa yang telah disepakati sebelumnya, yang seringkali berdasarkan afiliasi pribadi. Manager proyek sering menarik mitra yang dianggap bisa menguntungkan pribadinya. Praktik ini melanggar transparansi dan melemahkan persaingan yang sehat dalam PBJ. Akibatnya, proyek yang belum selesai atau proyek berkualitas rendah dianggap selesai, sehingga menurunkan kualitas proyek dan merugikan banyak pihak.⁶

Penyimpangan yang terjadi pada tahap pelaksanaan kontrak dan penyerahan barang/jasa seringkali melibatkan sejumlah pelanggaran, seperti adanya pekerjaan atau barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya, serta praktik serah terima pekerjaan meskipun belum mencapai tahap penyelesaian yang semestinya. Hal ini tentunya berpotensi menurunkan kualitas hasil akhir dari proyek dan merugikan pihak yang menerima barang atau jasa tersebut.

Penyimpangan pada tahap pengawasan sering kali terjadi dalam bentuk kolusi antara pelaksana proyek dan pengawas, di mana keduanya bekerja sama untuk menyembunyikan bahwa pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Selain itu, penyuapan terhadap pengawas proyek merupakan praktik untuk memberikan hadiah kepada pengawas karena menutup mata terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi selama proses pelaksanaan proyek. Laporan pengawasan juga seringkali tidak mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan, karena pengawas menyusun laporan yang tidak akurat guna melindungi kepentingan pelaksana proyek atau pihak tertentu, sehingga mengaburkan masalah yang terjadi.⁷

Pada tahap terakhir, yaitu tahap pelaporan keuangan dan audit. Pelaporan yang tidak jujur mencakup manipulasi data keuangan dan menyembunyikan informasi yang dapat merugikan pihak-pihak, terutama mengenai akuntabilitas penggunaan dana anggaran. Selain itu, baik karena kelalaian atau kesengajaan, bukti akuntansi palsu sering kali disajikan tanpa verifikasi yang memadai. Penyimpangan pada tahap ini sangat berbahaya karena tidak hanya mengganggu transparansi keuangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi pemilik proyek, pemerintah, atau masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari proyek tersebut.⁸



Gambar 3. Enam Tahapan Korupsi PBJ

⁶ "PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN COVID-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)," *PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM* 11, no. September (2023): 22–38.

⁷ Pusat Edukasi Anti Korupsi, "Mencegah Korupsi Pada Pengadaan Barang & Jasa."

⁸ Ibid.

Korupsi PBJ menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Sepanjang tahun 2017-2022, kerugian negara akibat korupsi di sektor ini mencapai Rp37,5 triliun. Angka ini mencerminkan besarnya dampak negatif dari praktik korupsi dalam proses PBJ, terutama pada proyek-proyek besar yang melibatkan anggaran negara.⁹ Korupsi ini tidak hanya mengakibatkan kerugian besar terhadap anggaran negara, namun juga melemahkan integritas proses pengadaan infrastruktur dan pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁰ Secara tidak langsung, dampak korupsi sangat merugikan masyarakat, sehingga penting bagi masyarakat untuk sadar dan bertindak melawan korupsi.¹¹

Menurut data yang disajikan, menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam PBJ masih sering terjadi di sektor konstruksi, sehingga memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Korupsi PBJ di sektor konstruksi di Indonesia seringkali disebabkan akibat ketidakpatuhan kontraktor terhadap spesifikasi teknis dan prosedur proyek, seperti kasus pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana, di mana material yang digunakan tidak sesuai standar sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 25 miliar akibat *mark-up* dalam pengadaan material, pemberian suap kepada pejabat untuk memenangkan tender meskipun kontraktor tidak memenuhi kriteria, dan memanipulasi laporan progress pekerjaan untuk ditagihkan lebih awal.¹² Serta kasus pembangunan Gedung Kampus IPDN di Gowa. Dengan modus rekayasa laporan progress pekerjaan, pemberian suap kepada pejabat proyek untuk memanipulasi proses pengadaan dan laporan pengawasan, dan pembuatan dokumen fiktif untuk mencairkan anggaran lebih awal mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 27 miliar.¹³

Untuk mencegah korupsi PBJ, kontraktor harus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dan memastikan setiap proses pengadaan transparan dan bebas dari kolusi dan nepotisme. Pelaporan yang akurat dan transparan mengenai anggaran, penggunaan material, dan kemajuan proyek juga penting untuk proses pemantauan yang optimal. Selain itu, kontraktor harus membangun sistem kepatuhan internal yang kuat dengan menerapkan kode etik, SOP yang jelas, dan pelatihan anti korupsi bagi seluruh karyawan. Penting bagi kontraktor untuk bekerja sama dengan regulator untuk memastikan bahwa semua proses mengikuti peraturan dan standar integritas yang tinggi.¹⁴ Dalam upaya untuk mengatasi korupsi di sektor ini, audit sosial telah muncul sebagai salah satu mekanisme partisipasi masyarakat yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Audit sosial memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut mengawasi proses pengadaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur, memastikan bahwa standar kualitas terpenuhi dan bahwa dana publik digunakan secara efisien.¹⁵ Audit sosial berperan penting dalam sektor konstruksi yang sering menjadi sasaran praktik korupsi karena banyaknya pemangku kepentingan dan besarnya anggaran yang terlibat. Dengan melibatkan masyarakat, audit sosial memastikan anggaran dibelanjakan secara tepat dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek konstruksi.¹⁶

Selain itu, dengan memberikan pemantauan independen terhadap pelaksanaan proyek, audit sosial dapat mencegah penyalahgunaan anggaran dan mengurangi kemungkinan kolusi antara pihak berwenang dan kontraktor. Dengan cara ini, audit sosial dapat membantu meminimalkan korupsi di sektor konstruksi dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemantauan proyek-proyek publik.

⁹ "Outlook Pemberantasan Korupsi 2024: Muslihat Politik Dan Pemberantasan Korupsi," <https://Antikorupsi.Org/>, last modified 2024, accessed October 14, 2024, [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/OUTLOOK 2024 - Muslihat Politik dan Pemberantasan Korupsi_0.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/OUTLOOK%2024%20-%20Muslihat%20Politik%20dan%20Pemberantasan%20Korupsi_0.pdf).

¹⁰ Cesar Rengganis, Maudy Nurunnisa, and Muhammad Sulthan Maulana, "Korupsi, Droit De Suit Pada PBJ Pemerintah," *Indonesian Rich Journal* 2, no. 2 (2021): 1–8.

¹¹ Marten Bunga et al., "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019): 85–97.

¹² Liputan6.com, "Korupsi RS Udayana Rugikan Negara Rp 25 Miliar," <https://www.liputan6.com/news/read/3665585/korupsi-rs-udayana-rugikan-negara-rp-25-miliar>, last modified 2018, <https://www.liputan6.com/news/read/3665585/korupsi-rs-udayana-rugikan-negara-rp-25-miliar>.

¹³ KPK, "TPK Pengadaan Dan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Kabupaten Gowa," <https://kpk.go.id/Id/Publikasi-Data>, last modified 2022, <https://kpk.go.id/Id/Publikasi-Data/penanganan-perkara/tpk-pengadaan-dan-pelaksanaan-pekerjaan-konstruksi-pembangunan-gedung-kampus-ipdn-di-kabupaten-gowa>.

¹⁴ Joe Demski, "Panduan Kepatuhan Kontraktor," <https://www.quickbase.com/>, last modified 2022, <https://www.quickbase.com/blog/what-is-contractor-compliance>.

¹⁵ "Reduce Corruption in Public Procurement: The Effort Towards Good Governance," *Bestuur* 10, no. 1 (2022): 33–42.

¹⁶ Satria Unggul Wicaksana Prakasa et al., "Public Procurement Nexus Social for Mitigate the Corruption: Lesson from Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 7, no. 2 (2023): 413–448.

Memberi kesempatan bagi publik dalam pencegahan korupsi PBJ pada sektor konstruksi di Indonesia, membuat masyarakat semakin sadar bahwa korupsi dapat terjadi kapan dan dimana saja.¹⁷

Partisipasi masyarakat erat kaitannya dengan keterbukaan lembaga pemerintah yang mengawasi korupsi PBJ. Karena semakin transparan lembaga-lembaga tersebut dalam memberikan informasi publik, maka semakin besar pula peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Pengungkapan informasi kepada publik dari pihak berwenang memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran, memberikan masukan, melaporkan dugaan korupsi, dan pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas pengawasan proyek pemerintah dan meningkatkan efektivitas.¹⁸

Penelitian ini mengkaji mengenai permasalahan terkait PBJ. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas lebih lanjut bagaimana kepatuhan kontraktor dan peran masyarakat serta keefektifitasan audit sosial dalam pencegahan korupsi PBJ pada sektor konstruksi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru yang berguna untuk mengatasi berbagai tantangan pengelolaan integritas di sektor ini dan berpotensi memberikan dampak positif pada tata kelola yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua masalah utama: 1) bagaimana kepatuhan kontraktor dan peran masyarakat dalam pencegahan korupsi PBJ di sektor konstruksi di Indonesia? 2) bagaimana efektivitas audit sosial dalam mencegah korupsi di sektor konstruksi di Indonesia?.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan *political economy of law*, yang merupakan studi interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum dengan aspek sosial, politik, dan ekonomi. Metode ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum adalah bagian integral dari struktur sosial yang dipengaruhi dan dibentuk ulang oleh dinamika politik, ekonomi, dan budaya, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari konteks tersebut dalam penerapannya.¹⁹ Pendekatan ini bertujuan untuk mempertemukan dan memadukan konsep serta teori dari berbagai disiplin ilmu guna mengkaji fenomena hukum secara holistik dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya di mana hukum tersebut berada.²⁰

Pendekatan *political economy of law* adalah studi tentang bagaimana hukum dan ekonomi berinteraksi dan bagaimana struktur kekuasaan politik mempengaruhi kebijakan ekonomi dan hukum. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa perekonomian tidak terisolasi, namun terhubung dengan masyarakat dan diatur oleh undang-undang. Dalam konteks ini, hukum dapat dilihat sebagai alat distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat.²¹ Dengan menggunakan metode sosio-legal dan pendekatan *political economy of law* dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan korupsi PBJ serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit sosial dalam pencegahan korupsi pada sektor konstruksi di Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kepatuhan Kontraktor dan Peran Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi PBJ pada Sektor Konstruksi di Indonesia

Sektor konstruksi di Indonesia memainkan peran krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi dan infrastruktur, memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta menciptakan lapangan kerja. Sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi, sektor ini membantu meningkatkan kualitas hidup melalui pembangunan infrastruktur yang lebih baik. PDB yang digunakan untuk mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu, mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara dan menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi dan keputusan investasi. Sektor konstruksi tidak hanya memacu sektor riil, tetapi juga membutuhkan pembiayaan signifikan dari

¹⁷ Maisya Ferico, Steven; Putri Aryanti, Elsa; Hanifah Salsabila, "PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI," *Jurnal Ilmu Humaniora dan Politik* 1, no. 1 (2020).

¹⁸ Eka Priska Kombong et al., "Pelayanan Publik Dan Kajian Putusan Korupsi Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Kontrak Jasa Konstruksi," *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020): 245-262.

¹⁹ Sulistyowati Irianto, *Kajian Sosio-Legal, Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, 2012.

²⁰ Brian Z. Tamanaha, *A Realistic Theory of Law, A Realistic Theory of Law*, 2017.

²¹ Will Kenton, "Political Economy Definition, History, and Applications," <https://www.investopedia.com/>, last modified 2024, accessed October 14, 2024, <https://www.investopedia.com/terms/p/political-economy.asp>.

lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, untuk mendanai proyek-proyek besar dengan jangka waktu pengembalian yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik sektor konstruksi sangat dipengaruhi oleh aspek finansial dan permodalan.²²

Korupsi PBJ di Indonesia menjadi masalah yang semakin mendesak, dengan sektor ini menyumbang sebagian besar kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Korupsi di sektor ini seringkali disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang terlibat dalam proses pengadaan, mulai dari perencanaan hingga penerimaan barang dan jasa. Praktik korupsi yang umum meliputi penggelembungan harga dan penyalahgunaan kekuasaan. Secara keseluruhan, korupsi dalam PBJ di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh untuk penanggulangannya.²³

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam PBJ sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.²⁴ Untuk mencegah korupsi, beberapa penelitian menyarankan perlunya digitalisasi dan penerapan tata kelola yang baik dalam proses pengadaan.²⁵ Oleh karena itu, penguatan sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat, merupakan kunci dalam upaya pencegahan korupsi dalam PBJ di sektor publik Indonesia.²⁶

Pencegahan korupsi di Indonesia, khususnya dalam PBJ di sektor konstruksi, menjadi sangat penting mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktik korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi di sektor ini sering kali melibatkan kolusi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik serta pihak-pihak terkait lainnya, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan yang seharusnya berjalan sesuai rencana.²⁷ Memperkuat hukum administrasi negara adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi, terutama dalam PBJ di sektor konstruksi.

Metode ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik, sehingga tindakan pemerintah dapat dipantau dan dipertanggung jawabkan dengan baik.²⁸ Pendidikan pencegahan korupsi di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan kesadaran dan membangun integritas generasi muda. Ini penting untuk menciptakan budaya anti-korupsi di sektor konstruksi, terutama dalam PBJ guna mencegah praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.²⁹ Selain itu, penerapan teknologi informasi melalui sistem *e-procurement* juga krusial dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi korupsi dengan mempermudah akses informasi publik. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang holistik dan terkoordinasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan sektor konstruksi Indonesia yang bebas dari korupsi, khususnya dalam pengelolaan PBJ.³⁰

Kepatuhan kontraktor sangat krusial dalam upaya pencegahan korupsi dalam PBJ di sektor konstruksi. Kepatuhan kontraktor adalah bagian dari manajemen kontraktor yang berhubungan dengan sejauh mana kontraktor berperilaku sesuai dengan ketentuan kontrak dan kebutuhan spesifik organisasi. Hal ini juga dapat merujuk pada sejauh mana perusahaan yang dikontrak akan mengambil langkah-

²² Tamia Tyahardi, Kusnendi, and Aneu Cakhyanu, "Analisis Faktor Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Sektor Konstruksi Di Indonesia," *Eksposisi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi* 13, no. 1 (2021): 83–102.

²³ Ahmad Rustan Syamsuddin, "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa," *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 161–181.

²⁴ Ibid.

²⁵ Rengganis, Nurunnisa, and Sulthan Maulana, "Korupsi, Droit De Suit Pada PBJ Pemerintah."

²⁶ Farhan Fakhriza Tsani, Yanti, Harti Budi &, "Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara," *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 2, no. 9 (2022).

²⁷ Jefirstson Richset Riwukore, "Pelatihan Penyusunan Konsep Strategi Pencegahan Korupsi Berbasis Sumber Daya Manusia Untuk ASN Pemerintah Kota Kupang," *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 4, no. 4 (2022): 648–672.

²⁸ and Winona Nurhikmah Rahim, Abdur, Naffisa Ulya Safitri, Nurjanah Nurjanah, Sahid Anabah, "Implementasi Hukum Administrasi Negara Dalam Mencegah Praktik Korupsi Di Indonesia," *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 6 (2023): 5790–5794.

²⁹ Mochammad Faizal and Rahmanita Budi Aisah, "Peranan Institusi Pendidikan Formal Dalam Pencegahan Tindak Korupsi Di Indonesia," *Preprint* (2019): 1–4.

³⁰ Darusalam Darusalam and Dhata Praditya, "Open Government Data Sebagai Inisiatif Anti-Korupsi Di Indonesia: A Cross-Country Comparison," *Jusifo (Jurnal Sistem Informasi)* 3, no. 1 (2017): 1–14.

langkah untuk memenuhi layanan, tugas, atau kewajiban yang telah disepakati. Sejauh mana pemberi kerja mempunyai hak untuk memantau kepatuhan kontraktor ditentukan dalam kontrak sebagai kewajiban atau hak khusus para pihak dalam kontrak, baik melalui penilaian potensi tanggung jawab atau melalui prakualifikasi kontraktor.³¹ Peran kepatuhan kontraktor sangat penting dalam memastikan integritas dan transparansi dalam proses PBJ di sektor konstruksi. Dengan mematuhi regulasi yang ada, kontraktor dapat mencegah praktik korupsi dan penyimpangan lainnya yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Studi menekankan bahwa akuntabilitas dan transparansi publik, yang didukung oleh kepatuhan kontraktor, merupakan instrumen efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.³²

Dalam industri konstruksi yang penuh tantangan dan persaingan, tanggung jawab dan etika bisnis memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan proyek. Tanggung jawab dan etika bisnis kontraktor dalam pekerjaan konstruksi memiliki cakupan yang luas, termasuk penerapan kejujuran, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap kerangka regulasi. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar yang baik untuk semua aktivitas dalam proyek, terutama selama fase-fase yang berbeda seperti fase perencanaan hingga fase akhir, sehingga mencegah penyimpangan dari standar kualitas yang ditetapkan, keselamatan, dan syarat-syarat kontrak. Selain kepuasan terhadap tuntutan teknis, para kontraktor juga memiliki kewajiban etis untuk menjaga hubungan etis dan profesional yang sesuai dengan semua pemangku kepentingan yang relevan termasuk klien proyek, instansi pemerintah, pekerja dalam proyek, dan masyarakat sekitar.³³

Komitmen terhadap hubungan etis ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan konflik kepentingan serta kesempatan untuk terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis seperti praktik korupsi atau bahkan penyalahgunaan sumber daya. Dengan memfokuskan pada etika bisnis, kontraktor dapat menghindari menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tindakan negatif yang memungkinkan keberhasilan penyelesaian proyek dalam aspek teknis serta aspek sosial dan lingkungan. Praktik etika bisnis yang konsisten juga merupakan faktor penting bagi reputasi perusahaan, kepercayaan klien terhadap perusahaan, dan untuk menghasilkan nilai bagi masyarakat.³⁴

Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kontraktor yang mengintegrasikan nilai-nilai ini berkinerja lebih baik. Tanggung jawab sosial dan integritas yang tinggi dalam operasional bisnis dapat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan industri konstruksi secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada penyelesaian proyek berkualitas tinggi, namun juga memperkuat daya saing perusahaan di pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, rasa tanggung jawab dan etika bisnis tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga merupakan strategi efektif untuk penciptaan nilai jangka panjang dalam industri konstruksi.

Kepatuhan terhadap peraturan dalam industri konstruksi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, menghasilkan proyek berkualitas, dan meningkatkan efisiensi. Setiap tahapan pekerjaan harus mengikuti pedoman teknis, keselamatan, dan manajemen proyek guna mengurangi risiko dan mendukung keberhasilan proyek. Kontraktor yang mematuhi regulasi memperoleh kepercayaan klien, daya saing lebih baik, dan peluang bisnis yang lebih besar.³⁵ Kepatuhan ini juga menjadi strategi penting untuk mencegah korupsi PBJ dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahap proyek.

Validasi kepatuhan kontraktor menilai kinerja mereka berdasarkan keselamatan kerja, kualitas, manajemen risiko, dan standar tata kelola seperti integritas dan penghindaran konflik kepentingan. Validasi subkontraktor memastikan kompetensi dan rekam jejak yang jelas, mencegah manipulasi atau penyalahgunaan yang merugikan proyek maupun negara.³⁶ Korupsi di sektor konstruksi dapat menyebabkan pemborosan anggaran, keterlambatan proyek, dan kualitas infrastruktur yang buruk, yang

³¹ Demski, "Panduan Kepatuhan Kontraktor."

³² Dwi Rahmawati Faizah, Widi Hartono, and Sugiyarto, "Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Terhadap Tingkatan Kecelakaan Kerja Konstruksi" 1, no. 4 (2013): 466–471.

³³ Ni Armaeni, "Kajian Etika Dan Profesionalisme Dalam Bisnis Konstruksi Indonesia," *Paduraksa* 3, no. 2 (2014): 45–60.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Dwi Friska G. Naibaho, "Evaluasi Kepatuhan Kontraktor Terhadap Penerapan Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Bangunan Instalasi," *Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan* (2001): 1–6.

³⁶ Lily Kholida and Rosmariansi Ariffudin, "Strategi Perencanaan Dan Pelaksanaan Dalam Pengadaan Subkontraktor Untuk Meningkatkan Kinerja K3 Pada Proyek Konstruksi Gedung," *Rekayasa Sipil* 10, no. 1 (2021): 1.

akhirnya berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat³⁷. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi dalam PBJ sangat penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas³⁸.

Pendidikan anti-korupsi kepada masyarakat, termasuk generasi muda, penting untuk menanamkan nilai integritas, etika bisnis, dan kesadaran akan dampak buruk korupsi. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan budaya anti-korupsi berkembang dan masyarakat aktif mengawasi proyek konstruksi.³⁹ Pencegahan korupsi di sektor konstruksi melibatkan peran penting berbagai lembaga pengawas dalam memastikan PBJ berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. KPK bertugas mencegah, menyelidiki, dan menuntut kasus korupsi serta mensosialisasikan bahaya korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit keuangan negara untuk memastikan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Kementerian PUPR mengawasi proyek infrastruktur agar memenuhi standar kualitas dan bebas korupsi dengan menerapkan pengendalian internal yang efektif.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit dan mengevaluasi program pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan serta memberikan pelatihan terkait pengelolaan keuangan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengelola dan memantau proses PBJ agar efisien, transparan, serta bebas praktik korupsi. Secara keseluruhan, lembaga-lembaga pengawas korupsi di Indonesia memiliki peran yang saling mendukung untuk membangun sistem pengelolaan keuangan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan adanya kolaborasi dan sinergi antara lembaga-lembaga tersebut, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat terlaksana dengan lebih efektif dan berkelanjutan.⁴⁰

Fungsi pengawasan berperan strategis dalam mencegah korupsi PBJ di sektor konstruksi, terutama yang melibatkan dana publik dalam jumlah besar. Pengawasan yang efektif, independen, transparan, dan sistematis diperlukan untuk meminimalkan potensi korupsi dalam proses pengadaan. Hal ini menuntut kolaborasi antara lembaga pengawas, pemerintah, dan masyarakat guna menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Mekanisme pengawasan di sektor ini memerlukan pendekatan terintegrasi dan menyeluruh, mengingat lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi sering menjadi pemicu utama korupsi.⁴¹

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam pencegahan korupsi di sektor konstruksi di Indonesia. Penerapan sistem yang transparan memungkinkan pengawasan publik yang efektif, sehingga peluang terjadinya korupsi dapat diminimalkan. Sementara itu, akuntabilitas memastikan setiap pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakannya. Penguatan lembaga pengawas dan penerapan prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengadaan publik, mengurangi korupsi, dan menghasilkan infrastruktur yang lebih berkualitas.⁴²

Pengawasan dalam mencegah korupsi pada PBJ di sektor konstruksi di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam. Lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya akuntabilitas sering menjadi penyebab utama terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Ketidakefektifan sistem pengawasan juga kerap gagal mendeteksi serta mencegah tindakan koruptif yang merugikan negara. Selain itu, tantangan makroekonomi, seperti tekanan dari krisis ekonomi global, turut

³⁷ vivi ariani et al., "Indikator Penyebab Praktik Korupsi Pada Industri Konstruksi Di Sumatera Barat," *Rekayasa Sipil* 17, no. 1 (2023): 15–22.

³⁸ Ario Damar, "Pendekatan Pencegahan Korupsi Skala Kecil (Petty Corruption) Pada Sektor Pelayanan Publik Di Indonesia," *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 5 (2023): 407–417.

³⁹ Adriandi Kasim, Wira Purwadi, and Kartika Amiri, "Meningkatkan Kesadaran Budaya Anti Korupsi Melalui Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Siswa SMA Muhammadiyah Manado," *NYIUR-Dimas: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 37–44.

⁴⁰ Engkus et al., "Korupsi Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Aparat Penegak Hukum," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 20, no. 1 (2022): 112–124; Nurhasanah Nurhasanah, "Efektivitas Pengendalian Internal, Audit Internal, Karakteristik Instansi Dan Kasus Korupsi (Studi Empiris Di Kementerian/ Lembaga)," *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara* (2016): 27–48.

⁴¹ Ulfah Apriani et al., "Pengaruh Independensi Pengawasan Internal Terhadap Pencegahan Korupsi Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Mahkamah Agung Ri)," *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (2019): 1–9.

⁴² Joras Ferwerda, Ioana Deleanu, and Brigitte Unger, "Corruption in Public Procurement: Finding the Right Indicators," *European Journal on Criminal Policy and Research* 23, no. 2 (2017): 245–267.

meningkatkan risiko korupsi melalui praktik pungutan liar atau manipulasi anggaran.⁴³

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat memegang peran penting dalam pencegahan korupsi pada PBJ di sektor konstruksi di Indonesia. Kolaborasi ini mencakup tidak hanya peran pemerintah dan masyarakat, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah. Kerja sama yang efektif dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya praktik korupsi.⁴⁴ Pendekatan yang dapat diambil dalam pencegahan korupsi PBJ di sektor konstruksi adalah dengan memperkuat tata kelola kolaboratif, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan. Komunikasi dan komitmen antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.⁴⁵

Kepatuhan kontraktor dan peran masyarakat dalam pencegahan korupsi pada PBJ di sektor konstruksi di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensional. Dalam konteks ini, kepatuhan kontraktor terhadap regulasi dan standar yang ditetapkan sangat penting untuk mencegah praktik korupsi. Peran masyarakat dalam pencegahan korupsi juga sangat krusial. Damar menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan praktik korupsi dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam sektor pelayanan public.⁴⁶

Masyarakat yang aktif berperan dalam mengawasi proyek konstruksi dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah potensi korupsi, sehingga meningkatkan akuntabilitas kontraktor dan pemerintah. Dengan demikian, kolaborasi antara kontraktor yang patuh dan masyarakat yang aktif berpartisipasi dapat menciptakan ekosistem yang lebih bersih dari korupsi. penguatan hukum administrasi negara dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah praktik korupsi di sektor public. Dengan memperkuat regulasi dan meningkatkan kapasitas pengawasan, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kepatuhan kontraktor.⁴⁷

3.2 Efektivitas Audit Sosial dalam Pencegahan Korupsi PBJ pada Sektor Konstruksi di Indonesia

Sektor konstruksi di Indonesia memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi, namun seringkali terjerat praktik korupsi yang merugikan. Korupsi dalam sektor ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran, keterlambatan proyek, dan pembengkakan biaya, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.⁴⁸ Karakteristik proyek konstruksi, yang melibatkan dana besar dan jangka waktu pengembalian panjang, turut memperburuk korupsi di sektor ini, menciptakan peluang untuk praktik koruptif seperti suap dalam proses pengadaan dan pengelolaan proyek.⁴⁹ Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya mempengaruhi efisiensi proyek, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga yang terlibat dalam pembangunan.⁵⁰

Pencegahan korupsi dalam PBJ di sektor konstruksi merupakan isu penting karena potensi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan pembangunan infrastruktur. Salah satu langkah strategis untuk mengatasi masalah ini adalah penerapan audit sosial, sebuah pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan proyek. Audit sosial adalah proses evaluasi partisipatif yang menilai transparansi, akuntabilitas, dan dampak sosial suatu aktivitas, khususnya dalam PBJ. Di sektor konstruksi, audit sosial memastikan

⁴³ Areta Betari Swari and Ulfi Pristiana, "Pengaruh Makro Ekonomi Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Sub Sektor Kontruksi Dan Bangunan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016 - 2018," *JEM17: Jurnal Ekonomi Manajemen* 5, no. 2 (2020): 107-127.

⁴⁴ Bunga et al., "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

⁴⁵ and Dessy Hassanah Darwis, Rudi Saprudin, Risna Resnawaty, "Peran Pemerintah Dalam Kolaborasi Stakeholders Pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (Csr)," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2019).

⁴⁶ Damar, "Pendekatan Pencegahan Korupsi Skala Kecil (Petty Corruption) Pada Sektor Pelayanan Publik Di Indonesia."

⁴⁷ Luk Luatun Yunaniah et al., "Optimalisasi Probit Audit Untuk Mencegah Korupsi Dan Meningkatkan Akuntabilitas Pengadaan Barang / Jasa Di" 3, no. 4 (2024): 233-242.

⁴⁸ Ridho Irawan, "Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2012 - 2022," *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 23, no. 2 (2023): 219-228.

⁴⁹ ariani et al., "Indikator Penyebab Praktik Korupsi Pada Industri Konstruksi Di Sumatera Barat."

⁵⁰ Fani Agista Heryani, "Perbandingan Tindak Pidana Korupsi Di Brazil Dengan Di Indonesia," *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* 3, no. 2 (2023): 175-188.

proyek berjalan sesuai prosedur, bebas korupsi, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.⁵¹ Selain itu, audit sosial memungkinkan masyarakat memantau alokasi anggaran, kualitas hasil kerja, dan dampak proyek, sehingga dapat mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini dan mendorong pelaku PBJ untuk lebih akuntabel.⁵²

Menurut *Centre for Good Governance*, manfaat audit sosial meliputi peningkatan reputasi, akuntabilitas, dan kepercayaan organisasi, serta memfokuskan kebijakan pada kebutuhan pemangku kepentingan. Audit sosial juga mengaktifkan perubahan organisasi dan membantu menyelaraskan prioritas dengan kebutuhan sosial.⁵³ Sementara itu, menurut John Pearce dan Alan Kay, audit sosial menyediakan kerangka kerja fleksibel, melibatkan pemangku kepentingan, dan mendorong konsistensi lembaga. Proses ini juga meningkatkan kepercayaan terhadap outcome proyek, memastikan manfaat yang dirasakan masyarakat, dan mengurangi potensi konflik kepentingan.⁵⁴

Secara keseluruhan, audit sosial merupakan alat strategis untuk mencegah korupsi, memperkuat pengawasan publik, dan memastikan keberhasilan proyek konstruksi yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Tantangan audit sosial khususnya di sektor konstruksi di Indonesia mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan proyek. Salah satu tantangan utama adalah tingginya risiko korupsi yang sering terjadi dalam industri ini. Kelemahan dalam regulasi dan penegakan hukum memperburuk praktik korupsi di sektor konstruksi, yang membutuhkan sistem perlindungan yang lebih baik untuk melindungi pemangku kepentingan.⁵⁵

Pentingnya peran komite audit dalam mencegah korupsi terkait laporan keuangan menunjukkan bahwa pengawasan internal yang kuat dapat mengurangi risiko penyalahgunaan di perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.⁵⁶ Dari sisi teknologi, tantangan dalam penerapan teknologi juga menjadi kendala dalam audit sosial di sektor konstruksi Indonesia. Adopsi *Internet of Things* (IoT) dalam industri konstruksi masih tertinggal, dengan anggaran penelitian dan pengembangan yang terbatas. Hal ini berpotensi menghambat efisiensi dan efektivitas pengawasan, serta meningkatkan risiko kesalahan dan potensi penyalahgunaan.⁵⁷

Meskipun ada kemajuan dalam penggunaan IoT, penerapannya di Indonesia masih dalam tahap awal dan membutuhkan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen proyek konstruksi.⁵⁸ Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam tantangan audit sosial di sektor konstruksi Indonesia adalah pengelolaan risiko dalam proyek konstruksi. Pembengkakan biaya (*cost overruns*) merupakan masalah umum yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek.⁵⁹ Masalah ini sering terjadi karena kurangnya perencanaan matang dan lemahnya pengawasan, yang meningkatkan risiko konflik dan klaim dalam proyek konstruksi.⁶⁰

Oleh karena itu, audit sosial perlu diterapkan untuk memastikan pengelolaan proyek sesuai

⁵¹ CHRIS B. MURPHY, "Social Audit: Definition, Items Examined, and Example," <https://www.investopedia-com>, last modified 2024, https://www.investopedia-com.translate.google/terms/s/social-audit.asp?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

⁵² Jeannette Weller, "Social Audits: When People Verify State Actions," <https://www.civilsocietyacademy.org/>.

⁵³ A Febrianty, "Audit Sosial Atas Realisasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Semen Bosowa Maros" (2016): 28–32, [http://eprints.unm.ac.id/4126/%0Ahttp://eprints.unm.ac.id/4126/1/SKRIPSI ANUGERAH FEBRIANTI.pdf](http://eprints.unm.ac.id/4126/%0Ahttp://eprints.unm.ac.id/4126/1/SKRIPSI_ANUGERAH_FEBRIANTI.pdf).

⁵⁴ Pudji Muljono, . Saharuddin, and Martua Sihaloho, "Pengembangan Sistem Audit Sosial Untuk Mengevaluasi Kinerja Layanan Pemberdayaan Sosial," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, no. 3 (2007): 417–444.

⁵⁵ Lauren Cindy Cintya, "Implikasi Hukum Penipuan Properti Dalam Industri Konstruksi Di Indonesia Article Info ABSTRAK," *jurnal hukun dan HAM wara sains* 2, no. 05 (2023): 389–400.

⁵⁶ Imam Handayani, Siti & Waskito, "The Moderating Effect Of Audit Committee On The Prevention Of Financial Statement Fraud With Pentagon Fraud Analysis," *Kasta : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya, dan Terapan* 1, no. 1 (2021): 14–28.

⁵⁷ Christopher Hansel Famdale and I Gede Agus Widyadana, "Aplikasi Dan Tantangan Pengembangan Pada Industri Konstruksi Di Indonesia," *Dimensi Utama Teknik Sipil* 10, no. 2 (2023): 156–173.

⁵⁸ Mia Wimala and Kineta Imanuela, "Perkembangan Internet of Things Di Industri Konstruksi," *Journal of Sustainable Construction* 1, no. 2 (2022): 43–51.

⁵⁹ Calvin Limantoro, Andi Andi, and Jani Rahardjo, "Analisa Faktor Cost Overruns Dengan Metode Interpretive Structural Modelling Pada Beberapa Proyek Konstruksi Di Indonesia," *Dimensi Utama Teknik Sipil* 10, no. 1 (2023): 20–37.

⁶⁰ Jannuar Jeremy, "Kajian Penyebab Klaim Konstruksi Di Negara Berkembang – Studi Kasus: Indonesia, Uni Emirate Arab, & India," *Journal of Sustainable Construction* 2, no. 2 (2023): 48–57.

standar, mengurangi penyalahgunaan, dan meningkatkan transparansi. Pendekatan menyeluruh diperlukan, seperti penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi, dan praktik audit sosial yang transparan dan akuntabel. Audit sosial berfungsi sebagai pengawasan efektif untuk memastikan anggaran dikelola dengan baik dan risiko korupsi diminimalkan melalui penanaman integritas dalam pengelolaan dana publik.⁶¹

Efektivitas audit sosial ditentukan oleh penerapan metode audit yang tepat, keterlibatan pemangku kepentingan, dan penggunaan teknologi informasi. Metode seperti *probity* audit efektif mencegah kecurangan dalam PBJ, terutama di sektor pemerintahan, dengan mengidentifikasi potensi fraud sejak awal.⁶² Selain itu, pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang didukung pelatihan dan sosialisasi meningkatkan pemahaman dan konsistensi dalam PBJ. Evaluasi berkala terhadap SOP membantu mengidentifikasi area perbaikan, sehingga risiko korupsi dapat diminimalkan.⁶³

Penggunaan teknologi informasi, seperti *e-procurement* dan *e-katalog*, penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan. *E-katalog* mengurangi waktu dan biaya, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memberikan kepuasan kepada penyedia. Selain itu, penerapan audit investigasi efektif mendeteksi *fraud* dan mendorong pencegahan korupsi.⁶⁴ Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan strategi yang lebih inovatif dan efektif dalam pencegahan korupsi, termasuk penerapan audit investigasi yang terbukti efektif dalam mendeteksi *fraud*.⁶⁵

Secara keseluruhan, efektivitas audit sosial dalam pencegahan korupsi pada sektor konstruksi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh penerapan metode audit yang tepat, pengembangan SOP yang baik, serta pemanfaatan teknologi informasi. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel dalam PBJ.

Korupsi adalah fenomena multidimensi yang bersifat sistemik dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan ekonomi, politik, dan sosial di banyak negara. Korupsi tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh struktur politik, budaya, dan kelembagaan yang memungkinkan praktik ini berlangsung secara luas.⁶⁶ Praktik ini menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang menghalangi investasi, karena investor tidak lagi dapat mempercayai sistem hukum yang adil dan transparan. Akibatnya, mereka cenderung menghindari pasar yang dianggap berisiko.

Korupsi juga meningkatkan biaya operasional melalui suap, yang merugikan efisiensi ekonomi. Selain itu, praktik suap dan kolusi merusak daya saing, karena keputusan bisnis lebih sering didasarkan pada hubungan pribadi daripada kualitas atau efisiensi, sehingga mengurangi daya tarik negara di mata investor. Korupsi juga menyebabkan pemborosan sumber daya, karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sering disalahgunakan.

Distorsi pasar terjadi akibat korupsi yang mengganggu persaingan yang seharusnya adil, menghasilkan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya. Akibatnya, produktivitas menurun, karena perusahaan lebih fokus untuk menghindari atau terlibat dalam korupsi daripada meningkatkan efisiensi. Semua faktor ini memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan mempengaruhi penggunaan sumber daya secara tidak optimal dan menciptakan iklim bisnis yang tidak kondusif.⁶⁷

Korupsi mengurangi penerimaan negara karena dana yang semestinya masuk ke kas negara, seperti pajak dan retribusi, kerap disalahgunakan melalui suap atau penggelapan. Selain itu, korupsi membebani anggaran proyek publik akibat pembengkakan biaya yang disebabkan oleh *mark-up* atau penggunaan material berkualitas rendah, sehingga proyek menjadi tidak efisien dan gagal berfungsi

⁶¹ Emmilia Rusdiana et al., "Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Program Dana Desa Di Kabupaten Gresik," *Law, Development and Justice Review* 3, no. 1 (2020): 29–41.

⁶² et al., "Efektivitas Probity Audit Dalam Mencegah Kecurangan PBJ," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10, no. 3 (2019): 550–568.

⁶³ Agus Arif Rakhman, "Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa," *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa* 2, no. 1 (2023): 47–59.

⁶⁴ Muhammad Iqbal, "Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm," *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 1 (2020): 77.

⁶⁵ NONPF, Raodahtul Jannah, and Suhartono, "Menelaah Dampak Penerapan Akuntansi Forensik Dalam Mendeteksi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Sektor Publik," *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo* 07, no. 2 (2018): 1–25.

⁶⁶ Julia Kwong, *The Political Economy of Corruption in China, The Political Economy of Corruption in China*, 2015.

⁶⁷ Lamijan Lamijan and Mohamad Tohari, "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3, no. 1 (2022): 40.

secara optimal. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat sering kali dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang mengakibatkan ketimpangan sosial semakin memburuk karena masyarakat kurang mampu tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga demokrasi, karena hal ini menimbulkan persepsi bahwa institusi negara tidak bekerja untuk kepentingan umum. Akibatnya, legitimasi institusi menurun, partisipasi masyarakat dalam proses politik berkurang, dan skeptisisme terhadap demokrasi meningkat. Dalam ranah politik, elite sering memanfaatkan korupsi untuk mempertahankan kekuasaan melalui distribusi patronase atau suap, yang menghambat reformasi struktural dan menjaga *status quo*. Kondisi ini melanggengkan kemiskinan dan ketidakadilan, karena sistem yang korup gagal menghasilkan kebijakan yang adil dan efektif, sehingga tata kelola pemerintahan tetap lemah.⁶⁸

Pencegahan konflik kepentingan dalam PBJ merupakan isu yang sangat penting dalam konteks pengelolaan sumber daya publik. Konflik kepentingan dapat muncul ketika individu atau kelompok memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan publik sehingga dapat mengarah pada penyimpangan dalam proses pengadaan dan korupsi. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan strategi yang efektif untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan ini.⁶⁹ Nilai-nilai ini harus ditanamkan sejak awal, terutama dalam institusi pendidikan dan organisasi publik, untuk membangun kesadaran akan pentingnya integritas dan transparansi. Selain itu, pengembangan instrumen yang jelas untuk mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan juga sangat diperlukan. Hal ini mencakup pembuatan pedoman dan prosedur yang dapat membantu dalam mendeteksi potensi konflik sebelum terjadi.⁷⁰

Dalam industri konstruksi, penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan langkah krusial yang mempengaruhi keberhasilan pengadaan barang dan jasa.⁷¹ Penyusunan HPS mengimplementasikan pendekatan yang terstruktur dan sistematis guna memastikan ketepatan, transparansi, dan akuntabilitas biaya. Proses ini mencakup analisis harga satuan pekerjaan (AHSP), evaluasi biaya sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), dan pemanfaatan analisis harga satuan dasar (HSD), yang menekankan pentingnya perencanaan berbasis data.

Keterlibatan AHSP dan analisis biaya pada setiap tahap proyek, mulai dari desain hingga pelaksanaan, membantu menjaga keberlanjutan finansial dan keselamatan proyek. Penggabungan biaya langsung dan tidak langsung memastikan bahwa semua aspek proyek, termasuk potensi dampak seperti kecelakaan konstruksi, dihitung secara tepat. Pendekatan ini mendorong pengadaan yang efisien dan efektif, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, dan akhirnya memperkuat kepercayaan publik. Dengan demikian, penyusunan HPS mendukung pengadaan yang adil, kompetitif, dan berkualitas tinggi, serta memastikan keberlanjutan dan keamanan proyek konstruksi.⁷²

Korosi kepercayaan dan legitimasi institusi menjadi isu krusial dalam pemerintahan dan organisasi publik. Fenomena ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti minimnya transparansi, kurangnya akuntabilitas, dan rendahnya responsivitas dalam pengelolaan institusi. Ketidakjelasan dan ketiadaan pertanggungjawaban dalam tata kelola dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.⁷³ Kepercayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada tindakan yang dilakukan oleh institusi, tetapi juga pada bagaimana masyarakat memandang legitimasi institusi tersebut. Legitimasi dapat dipahami sebagai persepsi masyarakat terhadap hak dan kewenangan institusi dalam menjalankan fungsinya.

Legitimasi yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan dan dukungan masyarakat, sementara

⁶⁸ Darusalam and Praditya, "Open Government Data Sebagai Inisiatif Anti-Korupsi Di Indonesia: A Cross-Country Comparison."

⁶⁹ Hendi Prihanto and Usmar Usmar, "Faktor Yang Menunjang Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)* 1, no. 2 (2020): 71–82.

⁷⁰ Beni Kurnia Illahi, "Internalisasi Nilai Antikorupsi Melalui Pencegahan Dan Pengendalian Benturan Kepentingan Di Perguruan Tinggi," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 28, no. 2 (2019): 136–152.

⁷¹ Agus Arif Rakhman, "Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Untuk Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi : Pendekatan Berbasis" (2024).

⁷² Ibid.

⁷³ Dhea Nur Azizah and Emy Kholifah R, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsivitas Dalam Pengelolaan APBDes Terhadap Kepercayaan Publik," *Pubmedia Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2023): 1–9.

legitimasi yang rendah cenderung menimbulkan ketidakpuasan dan resistensi terhadap institusi.⁷⁴ Penting bagi institusi untuk memahami bahwa kepercayaan dan legitimasi saling berhubungan erat; penurunan salah satu aspek akan berdampak pada aspek lainnya. Untuk memulihkan keduanya, institusi perlu memberikan perhatian khusus pada kualitas interaksi dengan masyarakat. Institusi harus berupaya menciptakan pengalaman positif bagi masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan persepsi legitimasi mereka. Dengan mengadopsi pendekatan yang berfokus pada masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan, institusi dapat memperbaiki kepercayaan dan legitimasi yang telah terkorosi.⁷⁵

IV. Kesimpulan

Korupsi di sektor konstruksi Indonesia merupakan tantangan serius yang menghambat pembangunan ekonomi, karena menyebabkan pemborosan anggaran, menurunkan efisiensi, dan merusak kepercayaan publik. Pencegahan korupsi PBJ pada sektor konstruksi di Indonesia membutuhkan kepatuhan kontraktor, partisipasi masyarakat, dan penguatan regulasi. Kolaborasi antara kontraktor yang patuh, masyarakat yang aktif, pemerintah, dan lembaga pengawas merupakan kunci untuk menciptakan sektor konstruksi yang berkelanjutan.

Audit sosial sangat penting dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor konstruksi. Efektivitas audit sosial sangat dipengaruhi oleh penerapan metode audit yang tepat untuk mendeteksi potensi kecurangan sejak awal seperti suap dan manipulasi anggaran. Untuk meningkatkan efektivitas audit sosial, pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait transparansi dan akuntabilitas PBJ, serta menerapkan sanksi hukum tegas bagi pelaku korupsi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta ekosistem PBJ yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, yang pada akhirnya mendukung pembangunan infrastruktur berkualitas dan meningkatkan kepercayaan publik. Strategi efektif juga harus diterapkan, seperti penanaman nilai integritas dan transparansi serta pengembangan instrumen yang terkait untuk mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan.

Daftar Pustaka.

- Apriani, Ulfah, Krissantono Karo Karo, Fatmamita Yuliana, Feliona Astika, Ridwan Ridwan, Darmawan Darmawan, Bustomi Bustomi, and Haryono Umar. "Pengaruh Independensi Pengawasan Internal Terhadap Pencegahan Korupsi Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Mahkamah Agung Ri)." *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (2019): 1-9.
- ariani, vivi, Dwifitra Y. Jumas, Wahyudi P. Utama, and Wenny W. Wahyudi. "Indikator Penyebab Praktik Korupsi Pada Industri Konstruksi Di Sumatera Barat." *Rekayasa Sipil* 17, no. 1 (2023): 15-22.
- Armaeni, Ni. "Kajian Etika Dan Profesionalisme Dalam Bisnis Konstruksi Indonesia." *Paduraksa* 3, no. 2 (2014): 45-60.
- Azizah, Dhea Nur, and Emy Kholifah R. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsivitas Dalam Pengelolaan APBDes Terhadap Kepercayaan Publik." *Pubmedia Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2023): 1-9.
- Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, and Hardianto Djanggih. "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019): 85-97.
- Chalid, Idham. "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Bantuan Sosial Dalam Penanganan Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)." *PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM* 11, no. September (2023): 22-38.
- CHRIS B. MURPHY. "Social Audit: Definition, Items Examined, and Example." <https://www.investopedia->

⁷⁴ Jonathan Tyler, Tom; Jackson, "Popular Legitimacy and the Exercise of Legal Authority : Motivating Compliance , Cooperation and Engagement Tom R. Tyler , Yale Law School Jonathan Jackson , Methodology Institute and Mannheim Centre for Criminology , LSE Abstract The Traditional Goal Of" (n.d.): 1-28.

⁷⁵ Cord Schmelzle, "Evaluating Governance: Effectiveness and Legitimacy in Areas of Limited Statehood," *SSRN Electronic Journal*, no. November (2012).

- Com. Last modified 2024. <https://www-investopedia-com.translate.goog/terms/s/social-audit.asp? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>.
- Cintya, Lauren Cindy. "Implikasi Hukum Penipuan Properti Dalam Industri Konstruksi Di Indonesia Article Info ABSTRAK." *jurnal hukun dan HAM wara sains* 2, no. 05 (2023): 389–400.
- CPI. "OUR WORK IN INDONESIA." <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>. Last modified 2023. Accessed October 17, 2024. <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>.
- Damar, Ario. "Pendekatan Pencegahan Korupsi Skala Kecil (Petty Corruption) Pada Sektor Pelayanan Publik Di Indonesia." *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 5 (2023): 407–417.
- Darusalam, Darusalam, and Dhata Praditya. "Open Government Data Sebagai Inisiatif Anti-Korupsi Di Indonesia: A Cross-Country Comparison." *Jusifo (Jurnal Sistem Informasi)* 3, no. 1 (2017): 1–14.
- Darwis, Rudi Saprudin, Risna Resnawaty, and Dessy Hassanah. "Peran Pemerintah Dalam Kolaborasi Stakeholders Pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (Csr)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2019).
- Demski, Joe. "Panduan Kepatuhan Kontraktor." <https://www.quickbase.com/>. Last modified 2022. <https://www.quickbase.com/blog/what-is-contractor-compliance>.
- Engkus, Azzahra Shabira, Cielo Laurensia Marsha, and Desvira Shabila Meghantara. "Korupsi Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 20, no. 1 (2022): 112–124.
- Faizah, Dwi Rahmawati, Widi Hartono, and Sugiyarto. "Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Terhadap Tingkatan Kecelakaan Kerja Konstruksi" 1, no. 4 (2013): 466–471.
- Faizal, Mochammad, and Rahmanita Budi Aisah. "Peranan Institusi Pendidikan Formal Dalam Pencegahan Tindak Korupsi Di Indonesia." *Preprint* (2019): 1–4.
- Famdale, Christopher Hansel, and I Gede Agus Widyadana. "Aplikasi Dan Tantangan Pengembangan Pada Industri Konstruksi Di Indonesia." *Dimensi Utama Teknik Sipil* 10, no. 2 (2023): 156–173.
- Fani Agista Heryani. "Perbandingan Tindak Pidana Korupsi Di Brazil Dengan Di Indonesia." *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* 3, no. 2 (2023): 175–188.
- Febrianty, A. "Audit Sosial Atas Realisasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Semen Bosowa Maros" (2016): 28–32. [http://eprints.unm.ac.id/4126/%0Ahttp://eprints.unm.ac.id/4126/1/SKRIPSI ANUGERAH FEBRIANTI.pdf](http://eprints.unm.ac.id/4126/%0Ahttp://eprints.unm.ac.id/4126/1/SKRIPSI_ANUGERAH_FEBRIANTI.pdf).
- Ferico, Steven; Putri Aryanti, Elsa; Hanifah Salsabila, Maisya. "Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Ilmu Humaniora dan Politik* 1, no. 1 (2020).
- Ferwerda, Joras, Ioana Deleanu, and Brigitte Unger. "Corruption in Public Procurement: Finding the Right Indicators." *European Journal on Criminal Policy and Research* 23, no. 2 (2017): 245–267.
- Handayani, Siti & Waskito, Imam. "The Moderating Effect Of Audit Committee On The Prevention Of Financial Statement Fraud With Pentagon Fraud Analysis." *Kasta : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya, dan Terapan* 1, no. 1 (2021): 14–28.
- ICW. "Outlook Pemberantasan Korupsi 2024: Muslihat Politik Dan Pemberantasan Korupsi." <https://Antikorupsi.Org/>. Last modified 2024. Accessed October 14, 2024. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/OUTLOOK 2024 - Muslihat Politik dan Pemberantasan Korupsi_0.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/OUTLOOK_2024_-_Muslihat_Politik_dan_Pemberantasan_Korupsi_0.pdf).
- Illahi, Beni Kurnia. "Internalisasi Nilai Antikorupsi Melalui Pencegahan Dan Pengendalian Benturan Kepentingan Di Perguruan Tinggi." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 28, no. 2 (2019): 136–152.
- Iqbal, Muhammad. "Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm." *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 1 (2020): 77.
- Irawan, Ridho. "Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2012 – 2022." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 23, no. 2 (2023): 219–228.
- Irianto, Sulistyowati. *Kajian Sosio-Legal. Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, 2012.
- Kasim, Adriandi, Wira Purwadi, and Kartika Amiri. "Meningkatkan Kesadaran Budaya Anti Korupsi Melalui Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Siswa SMA Muhammadiyah Manado."

- NYIUR-Dimas: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 37–44.
- Kenton, Will. "Political Economy Definition, History, and Applications." *Https://Www.Investopedia.Com/*. Last modified 2024. Accessed October 14, 2024. <https://www.investopedia.com/terms/p/political-economy.asp>.
- Kholida, Lily, and Rosmariyani Ariffudin. "Strategi Perencanaan Dan Pelaksanaan Dalam Pengadaan Subkontraktor Untuk Meningkatkan Kinerja K3 Pada Proyek Konstruksi Gedung." *Rekayasa Sipil* 10, no. 1 (2021): 1.
- Kombong, Eka Priska, Arief Setiawan, Budi Nugroho, and Richo Andi Wibowo. "Pelayanan Publik Dan Kajian Putusan Korupsi Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Kontrak Jasa Konstruksi." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020): 245–262.
- KPK. "STATISTIK DATA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN JENIS PERKARA." *Www.Kpk.Go.Id*. Last modified 2024. Accessed October 14, 2024. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>.
- KPK. "TPK Pengadaan Dan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Kabupaten Gowa." *Https://Kpk.Go.Id/Id/Publikasi-Data*. Last modified 2022. <https://kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/tpk-pengadaan-dan-pelaksanaan-pekerjaan-konstruksi-pembangunan-gedung-kampus-ipdn-di-kabupaten-gowa>.
- Kwong, Julia. *The Political Economy of Corruption in China. The Political Economy of Corruption in China*, 2015.
- Lamijan, Lamijan, and Mohamad Tohari. "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3, no. 1 (2022): 40.
- Limantoro, Calvin, Andi Andi, and Jani Rahardjo. "Analisa Faktor Cost Overruns Dengan Metode Interpretive Structural Modelling Pada Beberapa Proyek Konstruksi Di Indonesia." *Dimensi Utama Teknik Sipil* 10, no. 1 (2023): 20–37.
- Liputan6.com. "Korupsi RS Udayana Rugikan Negara Rp 25 Miliar." *Https://Www.Liputan6.Com/News*. Last modified 2018. <https://www.liputan6.com/news/read/3665585/korupsi-rs-udayana-rugikan-negara-rp-25-miliar>.
- Mawangi, Genta Tenri. "Wamenkumham: Korupsi Sulit Diberantas Karena Lemahnya Integritas." *Https://Www.AntaraneWS.Com/*. Last modified 2021. Accessed October 19, 2024. <https://www.antaraneWS.com/berita/2434665/wamenkumham-korupsi-sulit-diberantas-karenalemahnya-integritas>.
- Mulholland, Jeremy. "The Weakening of Indonesia's Corruption Eradication Commission." *Eastasiaforum.Org*. Last modified 2020. Accessed October 18, 2024. <https://eastasiaforum.org/2020/01/28/the-weakening-of-indonesias-corruption-eradication-commission/>.
- Muljono, Pudji, Saharuddin, and Martua Sihaloho. "Pengembangan Sistem Audit Sosial Untuk Mengevaluasi Kinerja Layanan Pemberdayaan Sosial." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, no. 3 (2007): 417–444.
- Naibaho, Dwi Friska G. "Evaluasi Kepatuhan Kontraktor Terhadap Penerapan Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Bangunan Instalasi." *Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan* (2001): 1–6.
- NONPF, Raodahtul Jannah, and Suhartono. "Menelaah Dampak Penerapan Akuntansi Forensik Dalam Mendeteksi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Sektor Publik." *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo* 07, no. 2 (2018): 1–25.
- Nurhasanah, Nurhasanah. "Efektivitas Pengendalian Internal, Audit Internal, Karakteristik Instansi Dan Kasus Korupsi (Studi Empiris Di Kementerian/ Lembaga)." *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara* (2016): 27–48.
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana, Achmad Hariri, Hilman Syahril Haq, Adhy Riadhy Arafah, and Muallimin Mochammad Sahid. "Public Procurement Nexus Social for Mitigate the Corruption: Lesson from Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 7, no. 2 (2023): 413–448.
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana, Asis, and Muallimin Mochammad Sahid. "Reduce Corruption in Public Procurement: The Effort Towards Good Governance." *Bestuur* 10, no. 1 (2022): 33–42.
- Prihanto, Hendi, and Usmar Usmar. "Faktor Yang Menunjang Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa

- Pemerintah." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)* 1, no. 2 (2020): 71–82.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. "Mencegah Korupsi Pada Pengadaan Barang & Jasa." <https://aclc.kpk.go.id/>. Last modified 2024. Accessed October 15, 2024. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240506-mencegah-korupsi-pada-pengadaan-barang-jasa>.
- Rahim, Abdur , Naffisa Ulya Safitri, Nurjanah Nurjanah, Sahid Anabah, and Winona Nurhikmah. "Implementasi Hukum Administrasi Negara Dalam Mencegah Praktik Korupsi Di Indonesia." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 6 (2023): 5790–5794.
- Rakhman, Agus Arif. "Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa." *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa* 2, no. 1 (2023): 47–59.
- Rakhman, Agus Arif. "Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Untuk Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi : Pendekatan Berbasis" (2024).
- Ramadhan, Muh Syahru, and Johan Arifin. "Efektivitas Probity Audit Dalam Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang Dan Jasa." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10, no. 3 (2019): 550–568.
- Rengganis, Cesar, Maudy Nurunnisa, and Muhammad Sulthan Maulana. "Korupsi, Droit De Suit Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Indonesian Rich Journal* 2, no. 2 (2021): 1–8.
- Riwukore, Jefirstson Richset. "Pelatihan Penyusunan Konsep Strategi Pencegahan Korupsi Berbasis Sumber Daya Manusia Untuk ASN Pemerintah Kota Kupang." *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 4, no. 4 (2022): 648–672.
- Rusdiana, Emmilia, Pudji Astuti, Nurul Hikmah, and Gelar Ali Ahmad. "Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Program Dana Desa Di Kabupaten Gresik." *Law, Development and Justice Review* 3, no. 1 (2020): 29–41.
- Schmelzle, Cord. "Evaluating Governance: Effectiveness and Legitimacy in Areas of Limited Statehood." *SSRN Electronic Journal*, no. November (2012).
- Swari, Areta Betari, and Ulfi Pristiana. "Pengaruh Makro Ekonomi Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Sub Sektor Kontruksi Dan Bangunan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016 - 2018." *JEM17: Jurnal Ekonomi Manajemen* 5, no. 2 (2020): 107–127.
- Syamsuddin, Ahmad Rustan. "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa." *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 161–181.
- Tamanaha, Brian Z. *A Realistic Theory of Law. A Realistic Theory of Law*, 2017.
- Tamia Tyahardi, Kusnendi, and Aneu Cakhyaneu. "Analisis Faktor Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Sektor Konstruksi Di Indonesia." *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi* 13, no. 1 (2021): 83–102.
- Transparency International. *Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Publik*, 2006. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxpb-qsdv3AhWsTGwGHVltC3EQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.unnes.ac.id%2Fnju%2Findex.php%2Fabdimas%2Farticle%2FviewFile%2F32372%2F12382&usg=AOvVaw3-WUfGEVN53gd0I1>.
- Tsani. Yanti, Harti Budi &, Farhan Fakhriza. "ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA." *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 2, no. 9 (2022).
- Tyler, Tom; Jackson, Jonathan. "Popular Legitimacy and the Exercise of Legal Authority : Motivating Compliance , Cooperation and Engagement Tom R . Tyler , Yale Law School Jonathan Jackson , Methodology Institute and Mannheim Centre for Criminology , LSE Abstract The Traditional Goal Of" (n.d.): 1–28.
- Weller, Jeannette. "Social Audits: When People Verify State Actions." <https://www.civilsocietyacademy.org/>.
- Wimala, Mia, and Kineta Imanuela. "Perkembangan Internet of Things Di Industri Konstruksi." *Journal of Sustainable Construction* 1, no. 2 (2022): 43–51.
- Yeremy, Jannuar. "Kajian Penyebab Klaim Konstruksi Di Negara Berkembang – Studi Kasus: Indonesia, Uni Emirate Arab, & India." *Journal of Sustainable Construction* 2, no. 2 (2023): 48–57.

Yunaniah, Luk Luatun, Amrie Firmansyah, Universitas Trisakti, Universitas Pembangunan, and Nasional Veteran. "OPTIMALISASI PROBITY AUDIT UNTUK MENCEGAH KORUPSI DAN MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG / JASA DI" 3, no. 4 (2024): 233–242.